

**DAFTAR ISIAN**  
**TINGKAT PERKEMBANGAN DESA DAN KELURAHAN**

Desa: PATIHAN  
Kecamatan: MANGUHARJO  
Kota: KOTA MADIUN  
Provinsi: JAWA TIMUR  
Bulan: 11  
Tahun: 2018

Nama Pengisi: PURWANTO,SPd  
Pekerjaan: PNS  
Jabatan: STAF KELURAHAN

Kepala Desa / Lurah: DJOKO SLAMET HARDJANA, SH.

SUMBER DATA YANG DIGUNAKAN UNTUK MENGGISI  
PROFIL DESA/KELURAHAN

Referensi 1 : Buku Panduan Profil Kelurahan  
Referensi 2: Data dari Kasi Pemerintahan  
Referensi 3: Data dari Kasi Trantib  
Referensi 4: Data dari Kasi Sosial

**I. PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN**

<b>A. Jumlah Penduduk</b>		
Jumlah	Jenis Kelamin	
	Laki-laki	Perempuan
Jumlah penduduk tahun ini	2691 orang	2844 orang
Jumlah penduduk tahun lalu	2684 orang	2823 orang
Persentase perkembangan	0.26 %	0.74 %

<b>B. Jumlah Keluarga</b>			
Jumlah	KK Laki-laki	KK Perempuan	Jumlah Total
Jumlah Kepala Keluarga tahun ini	0 KK	0 KK	0 KK
Jumlah Kepala Keluarga tahun lalu	893 KK	412 KK	1305 KK
Prosentase Perkembangan	-100 %	-100 %	

## **II. EKONOMI MASYARAKAT**

<b>A. Pengangguran</b>	
1. Jumlah angkatan kerja (penduduk usia 18-56 tahun)	1700 orang
2. Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang masih sekolah dan tidak bekerja	733 orang
3. Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang menjadi ibu rumah tangga	2085 orang
4. Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang bekerja penuh	2913 orang
5. Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang bekerja tidak tentu	307 orang
6. Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang cacat dan tidak bekerja	3 orang
7. Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang cacat dan bekerja	6 orang

-2-

<b>B. Kesejahteraan Keluarga</b>
----------------------------------

1. Jumlah keluarga prasejahtera	3 keluarga
2. Jumlah keluarga sejahtera 1	283 keluarga
3. Jumlah keluarga sejahtera 2	370 keluarga
4. Jumlah keluarga sejahtera 3	402 keluarga
5. Jumlah keluarga sejahtera 3 plus	271 keluarga
6. Total jumlah kepala keluarga	1329 keluarga

### III. PRODUK DOMESTIK DESA/KELURAHAN BRUTO

#### A. SUBSEKTOR PERTANIAN

Tanaman	Luas Produksi (Ha)	Hasil Produksi (Ton/Ha)	Nilai produksi (Rp)	Biaya pemupukan (Rp)	Biaya bibit (Rp)	Biaya obat (Rp)	Biaya lainnya (Rp)
Padi sawah	25	12	1275000000	2500000	2000000	1500000	1000000

#### B. SUBSEKTOR PERKEBUNAN

Tanaman	Luas Produksi (Ha)	Hasil Produksi (Ton/Ha)	Nilai produksi (Rp)	Biaya pemupukan (Rp)	Biaya bibit (Rp)	Biaya obat (Rp)	Biaya lainnya (Rp)
Tebu	0	0	0	0	0	0	0

#### C. SUBSEKTOR PETERNAKAN

Jenis Produksi	Hasil Produksi	Nilai produksi (Rp)	Nilai Bahan Baku yg digunakan (Rp)	Nilai Bahan Penolong yg digunakan (Rp)	Jumlah Ternak (Ekor)
Daging	200 960	0	0	0	50

<b>D. SUBSEKTOR PERIKANAN</b>						
Jenis Produksi	Hasil Produksi (Ton/Tahun)	Nilai produksi (Rp)	Nilai Bahan Baku yg digunakan (Rp)	Nilai Bahan Penolong yg digunakan (Rp)	Total biaya antara yang dihabiskan (Rp)	Jenis usaha perikanan
Lele	1	12500000	300000	0	0	0

<b>E. SEKTOR PERTAMBANGAN DAN GALIAN</b>	
Total nilai produksi tahun ini	Rp. 0,00
Total nilai bahan baku yang digunakan	Rp. 0,00
Total nilai bahan penolong yang digunakan	Rp. 0,00
Total biaya antara yang dihabiskan	Rp. 0,00
Jumlah total jenis bahan tambang dan galian yang ada	0 jenis
<b>F. SUBSEKTOR KERAJINAN</b>	
Total nilai produksi tahun ini	Rp. 40.000.000
Total nilai bahan baku yang digunakan	Rp. 20.580.000
Total nilai bahan penolong yang digunakan	Rp. 9.500.000
Total biaya antara yang dihabiskan	Rp. 30.080.000
Total jenis kerajinan rumah tangga	2 jenis
<b>G. SEKTOR INDUSTRI PENGOLAHAN</b>	
<b>H. SUBSEKTOR KEHUTANAN</b>	
Total nilai produksi tahun ini	Rp. 0,00

Total nilai bahan baku yang digunakan	Rp. 0,00
Total nilai bahan penolong yang digunakan	Rp. 0,00
Total biaya antara yang dihabiskan	Rp. 0,00
<b>I. SEKTOR PERDAGANGAN, HOTEL DAN RESTORAN</b>	
<b>I.1. Subsektor Perdagangan Besar</b>	
Total nilai transaksi	Rp. 0,00
Total nilai aset perdagangan yang ada	Rp. 0,00
Total jumlah jenis perdagangan besar	Rp. 0,00
Total nilai biaya yang dikeluarkan	Rp. 0,00
Total biaya antara lainnya	Rp. 0,00
<b>I.2. Subsektor Perdagangan Eceran</b>	
Jumlah total jenis perdagangan eceran	68 jenis
Total nilai transaksi	Rp. 70.000.000,00
Total nilai biaya yang dikeluarkan	Rp. 27.000.000,00
Total nilai aset perdagangan eceran	Rp. 110.000.000,00
<b>I.3. Subsektor Hotel</b>	
Jumlah total penginapan dan penyediaan akomodasi yang ada	2 jenis
Jumlah total pendapatan	Rp. 455.000.000,00
Jumlah total biaya pemeliharaan	Rp. 218.000.000,00
Jumlah biaya antara yang dikeluarkan	Rp. 182.000.000,00
Jumlah total pendapatan yang diperoleh	Rp. 55.000.000,00

<b>I.4. Subsektor Restoran</b>	
Jumlah tempat penyediaan konsumsi	0 Unit
Biaya konsumsi yang dikeluarkan	Rp. 0,00
Biaya antara lainnya	Rp. 0,00
Jumlah total pendapatan yang diperoleh	Rp. 0,00
<b>J. Sektor Bangunan/Konstruksi</b>	
Jumlah bangunan yang ada tahun ini	5 unit
Biaya pemeliharaan yang dikeluarkan	Rp. 00
Total nilai bangunan yang ada	Rp. 47.987.000
Biaya antara lainnya	Rp. 9.597.400
<b>K. Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan</b>	
<b>K.1. Subsektor Bank</b>	
Jumlah transaksi perbankan	Rp. 0,00
Jumlah nilai transaksi perbankan	Rp. 0,00
Jumlah biaya yang dikeluarkan	Rp. 0,00
<b>K.2. Subsektor lembaga keuangan bukan bank</b>	
Jumlah lembaga keuangan bukan bank	5 Unit
Jumlah kegiatan jasa penunjang lembaga keuangan bukan bank	2 Jenis
Nilai transaksi lembaga keuangan bukan bank	Rp. 1.500.000.000,00
Biaya yang dikeluarkan	Rp. 60.000.000,00
<b>K.3. Subsektor Sewa Bangunan</b>	

Jumlah usaha persewaan bangunan dan tanah	0 unit
Total nilai persewaan yang dicapai	Rp. 0,00
Biaya yang dikeluarkan	Rp. 0,00
Biaya lainnya	Rp. 0,00
<b>K.4. Subsektor Jasa Perusahaan</b>	
Jumlah perusahaan jasa	2 Jenis
Nilai transaksi perusahaan jasa	Rp. 135.000.000,00
Biaya yang dikeluarkan	Rp. 13.000.000,00
Biaya lainnya	Rp. 70.000.000,00
<b>L. SEKTOR JASA-JASA</b>	
<b>L.1. Subsektor jasa pemerintahan umum</b>	
Jumlah jenis jasa pelayanan pemerintahan kepada masyarakat	0 unit
Nilai transaksi pelayanan pemerintahan kepada masyarakat	Rp. 0,00
Biaya yang dikeluarkan dalam pelayanan	Rp. 0,00
<b>L.2. Subsektor jasa swasta</b>	
Jumlah usaha jasa pelayanan sosial yang disediakan masyarakat	jenis
Nilai aset produksi jasa pelayanan sosial	Rp. 0,00
Biaya yang dikeluarkan	Rp. 0,00
<b>L.3. Subsektor Jasa hiburan dan rekreasi</b>	
Jumlah jenis jasa hiburan dan rekreasi	0 jenis
Nilai transaksi usaha jasa hiburan dan rekreasi	Rp. 0,00

Biaya antara yang dikeluarkan	Rp. 0,00
<b>L.4. Subsektor Jasa Perorangan dan Rumah Tangga</b>	
Jumlah jenis kegiatan jasa pelayanan perorangan dan rumah tangga	0 jenis
Nilai aset jasa pelayanan perorangan dan rumah tangga	Rp 0,00
Nilai transaksi jasa pelayanan perorangan dan rumah tangga	Rp 0,00
Biaya antara yang dikeluarkan	Rp 0,00
<b>M. SEKTOR ANGKUTAN DAN KOMUNIKASI</b>	
<b>M.1. Subsektor Angkutan</b>	
Jumlah jenis kegiatan pengangkutan orang dan barang dengan alat angkut kendaraan jalan raya, laut, rel, udara, dan sungai/danau/penyeberangan	1 Jenis
Jumlah total kendaraan angkutan	3 Unit
Nilai total transaksi pengangkutan	Rp 2.500.000
Nilai total biaya yang dikeluarkan	Rp 950.000.000
<b>N. SEKTOR LISTRIK, GAS &amp; AIR MINUM</b>	
<b>N.1. Subsektor Listrik</b>	
Jumlah jenis kegiatan pembangkitan dan penyaluran tenaga listrik	0 Jenis
Jumlah nilai produksi listrik	Rp 0,00
Jumlah total nilai transaksi	Rp 0,00
Jumlah biaya antara yang dikeluarkan	Rp 0,00
<b>N.2. Subsektor Gas</b>	



Jumlah kegiatan penyediaan gas	0 jenis
Nilai aset produksi gas	Rp 0,00
Nilai transaksi	Rp 0,00
Biaya antara yang dikeluarkan	Rp 0,00
<b>N.3. Subsektor Air Minum</b>	
Jumlah jenis kegiatan penyediaan dan penyaluran air minum	0 jenis
Nilai aset penyediaan air minum	Rp 0,00
Nilai produksi air minum	Rp 0,00
Nilai transaksi air minum	Rp 0,00
Biaya antara yang dikeluarkan	Rp 0,00

#### **IV. PENDAPATAN PERKAPITA**

##### **A. Pendapatan perkapita menurut sektor usaha**

<b>A.1. Pertanian</b>	
1. Jumlah rumah tangga	<b>48</b> Keluarga
2. Jumlah total anggota rumah tangga	<b>200</b> orang
3. Jumlah rumah tangga buruh tani	<b>6</b> Keluarga
4. Jumlah anggota rumah tangga buruh	<b>30</b> orang
5. Jumlah pendapatan perkapita dari sektor tersebut untuk setiap rumah tangga	Rp 1.300.000,00
<b>A.2. Peternakan</b>	
1. Jumlah rumah tangga	<b>0</b> Keluarga
2. Jumlah total anggota rumah tangga	<b>0</b> orang
3. Jumlah rumah tangga buruh tani	<b>0</b> Keluarga

4. Jumlah anggota rumah tangga buruh	0 orang
5. Jumlah pendapatan perkapita dari sektor tersebut untuk setiap rumah tangga	Rp 0,00
<b>A.3. Perikanan</b>	
1. Jumlah rumah tangga	2 Keluarga
2. Jumlah total anggota rumah tangga	2 orang
3. Jumlah rumah tangga buruh tani	0 Keluarga
4. Jumlah anggota rumah tangga buruh	0 orang
5. Jumlah pendapatan perkapita dari sektor tersebut untuk setiap rumah tangga	Rp 5.000.000,00
<b>A.4. Kerajinan</b>	
1. Jumlah rumah tangga	0 Keluarga
2. Jumlah total anggota rumah tangga	0 orang
3. Jumlah rumah tangga buruh tani	0 Keluarga
4. Jumlah anggota rumah tangga buruh	0 orang
5. Jumlah pendapatan perkapita dari sektor tersebut untuk setiap rumah tangga	Rp 0,00
<b>A.5. Kehutanan</b>	
1. Jumlah rumah tangga	0 Keluarga
2. Jumlah total anggota rumah tangga	0 orang
3. Jumlah rumah tangga buruh tani	0 Keluarga
4. Jumlah anggota rumah tangga buruh	0 orang
5. Jumlah pendapatan perkapita dari sektor tersebut untuk setiap rumah tangga	Rp 0,00
<b>A.6. Industri kecil, menengah dan besar</b>	

1. Jumlah rumah tangga	2 Keluarga
2. Jumlah total anggota rumah tangga	2 orang
3. Jumlah rumah tangga buruh tani	2 Keluarga
4. Jumlah anggota rumah tangga buruh	2 orang
5. Jumlah pendapatan perkapita dari sektor tersebut untuk setiap rumah tangga	Rp 1.500.000,00
<b>A.7. Jasa dan perdagangan</b>	
1. Jumlah rumah tangga	12 Keluarga
2. Jumlah total anggota rumah tangga	38 orang
3. Jumlah rumah tangga buruh tani	8 Keluarga
4. Jumlah anggota rumah tangga buruh	20 orang
5. Jumlah pendapatan perkapita dari sektor tersebut untuk setiap rumah tangga	Rp 2.050.000,00

<b>B. PENDAPATAN RILL KELUARGA</b>	
Jumlah Kepala Keluarga	1456 KK
Jumlah Anggota Keluarga	5535 orang
Jumlah Pendapatan Kepala Keluarga	Rp 4.000.000,00
Jumlah pendapatan dari anggota keluarga yang bekerja	Rp 1.300.000,00

## V. STRUKTUR MATA PENCAHARIAN MENURUT SEKTOR

<b>1. Sektor Pertanian</b>	
Petani	48 orang
Buruh Tani	105 orang
Pemilik Usaha Tani	48 orang

<b>2. Sektor Perkebunan</b>	
Karyawan Perusahaan Perkebunan	0 orang
Buruh perkebunan	0 orang
Pemilik usaha Perkebunan	0 orang
<b>3. Sektor Peternakan</b>	
Peternakan Perorangan	0 orang
Buruh Usaha Peternakan	0 orang
Pemilik Usaha Peternakan	0 orang
<b>4. Sektor Perikanan</b>	
Nelayan	2 orang
Buruh Usaha Perikanan	0 orang
Pemilik Usaha Perikanan	0 orang
<b>5. Sektor Kehutanan</b>	
Pengumpul Hasil Hutan	orang
Buruh Usaha Pengolahan Hasil Hutan	orang
Pemilik Usaha Pengolahan Hasil Hutan	orang
<b>6. Sektor Pertambangan dan Bahan Galian C</b>	
Penambang Galian C Perorangan	0 orang
Buruh Usaha Pertambangan	0 orang
Pemilik Usaha Pertambangan	0 orang

<b>7. Sektor Industri Kecil &amp; Kerajinan Rumah Tangga</b>	
Tukang batu	21 orang
Pemulung	9 orang
Tukang jahit	6 orang
Tukang kue	9 orang
Tukang anyaman	0 orang
Pengrajin industri rumah tangga lainnya	2 orang
<b>8. Sektor Industri Menengah dan Besar</b>	
Karyawan perusahaan swasta	2775 orang
<b>9. Sektor Perdagangan</b>	
Karyawan Perdagangan Hasil Bumi	23 orang
Buruh Perdagangan Hasil Bumi	8 orang
Pengusaha Perdagangan Hasil Bumi	6 orang
<b>10. Sektor Jasa</b>	
Buruh usaha hotel dan penginapan lainnya	10 orang
TNI	17 orang
POLRI	10 orang
Dukun/paranormal/supranatural	2 orang
Jasa pengobatan alternatif	2 orang
Guru swasta	13 orang
Jasa Konsultansi Manajemen dan Teknis	1 orang

Pembantu rumah tangga	8 orang
Sopir	6 orang
Wiraswasta lainnya	11 orang

## VI. PENGUASAAN ASET EKONOMI MASYARAKAT

<b>A. ASET TANAH</b>	
Tidak memiliki tanah	411 orang
Memiliki tanah antara 0,1-0,2 ha	342 orang
Memiliki tanah antara 0,21-0,3 ha	39 orang
Memiliki tanah antara 0,31-0,4 ha	31 orang
Memiliki tanah antara 0,41-0,5 ha	27 orang
Memiliki tanah antara 0,51-0,6 ha	23 orang
Memiliki tanah antara 0,61-0,7 ha	12 orang
Memiliki tanah antara 0,71-0,8 ha	22 orang
Memiliki tanah antara 0,81-0,9 ha	6 orang
Memiliki tanah antara 0,91-1,0 ha	12 orang
Memiliki tanah antara 1,0 – 5,0 ha	2 orang
memiliki tanah antara 5,0 – 10 ha	0 orang
Memiliki tanah lebih dari 10 ha	0 orang
Jumlah total penduduk	927 orang
<b>B. ASET SARANA TRANSPORTASI UMUM</b>	
Memiliki ojek	2 orang- 2 unit
Memiliki becak	1 orang- 1 unit

Memiliki cidemo/andong/dokar	0 orang- 0 unit
Memiliki kapal motor	0 orang- 0 unit
Memiliki bus	0 orang- 0 unit
Memiliki mini bus	0 orang- 0 unit
Memiliki helikopter dan atau pesawat	0 orang- 0 unit
<b>C. ASET SARANA PRODUKSI</b>	
Memiliki penggilingan padi	1 orang
Memiliki traktor	2 orang
Memiliki pabrik pengolahan hasil pertanian	1 orang
Memiliki kapal penangkap ikan	0 orang
Memiliki alat pengolahan hasil perikanan	0 orang
Memiliki alat pengolahan hasil peternakan	0 orang
Memiliki alat pengolahan hasil perkebunan	0 orang
Memiliki alat pengolahan hasil hutan	0 orang
Memiliki alat produksi dan pengolah hasil pertambangan	0 orang
Memiliki alat produksi dan pengolah hasil pariwisata	0 orang
Memiliki alat produksi dan pengolah hasil industri jasa perdagangan	0 orang
Memiliki alat produksi dan pengolah hasil industri kerajinan keluarga skala kecil dan menengah	1 orang
Memiliki alat produksi dan pengolahan hasil industri migas	4 orang
<b>D. ASET PERUMAHAN RUMAH MENURUT DINDING</b>	
Tembok	1621 rumah
<b>RUMAH MENURUT LANTAI</b>	

Keramik	233 rumah
Semen	533 rumah
<b>RUMAH MENURUT ATAP</b>	
Genteng	115 rumah

## VII. PEMILIKAN ASET EKONOMI LAINNYA

Jumlah keluarga memiliki TV dan elektronik lainnya	2030 Keluarga
Jumlah keluarga memiliki sepeda motor/sejenisnya	1002 Keluarga
Jumlah keluarga memiliki mobil dan sejenisnya	25 Keluarga
Jumlah keluarga yang memiliki buku tabungan bank	1200 Keluarga
Jumlah keluarga memiliki usaha perikanan	2 Keluarga
Jumlah keluarga memiliki usaha di pasar desa	8 Keluarga

## VIII. PENDIDIKAN MASYARAKAT

<b>A. Tingkat Pendidikan Penduduk</b>	
Jumlah penduduk buta aksara dan huruf latin	20 orang
Jumlah penduduk usia 3-6 tahun yang masuk TK dan Kelompok Bermain Anak	62 orang
Jumlah anak dan penduduk cacat fisik dan mental	1 orang
Jumlah penduduk sedang SD/ sederajat	55 orang
Jumlah penduduk tamat SD/ sederajat	130 orang
Jumlah penduduk tidak tamat SD/ sederajat	9 orang
Jumlah penduduk sedang SLTP/ sederajat	121 orang
Jumlah penduduk tamat SLTP/ sederajat	233 orang



Jumlah penduduk sedang SLTA/ sederajat	15 orang
Jumlah penduduk tidak tamat SLTP/ Sederajat	10 orang
Jumlah penduduk tamat SLTA/ Sederajat	233 orang
Jumlah penduduk sedang D-1	55 orang
Jumlah penduduk tamat D-1	4200 orang
Jumlah penduduk sedang D-2	20 orang
Jumlah penduduk tamat D-2	859 orang
Jumlah penduduk sedang D-3	8 orang
Jumlah penduduk tamat D-3	145 orang
Jumlah penduduk sedang S-1	0 orang
Jumlah penduduk tamat S-1	45 orang
Jumlah penduduk sedang S-2	0 orang
Jumlah penduduk tamat S-2	22 orang
Jumlah penduduk tamat S-3	0 orang
Jumlah penduduk sedang SLB A	0 orang
Jumlah penduduk tamat SLB A	0 orang
Jumlah penduduk sedang SLB B	0 orang
Jumlah penduduk tamat SLB B	0 orang
Jumlah penduduk sedang SLB C	0 orang
Jumlah penduduk tamat SLB C	0 orang
Jumlah penduduk cacat fisik dan mental	6 orang
<b>B. Wajib belajar 9 tahun</b>	
1. Jumlah penduduk usia 7-15 tahun	361 orang
2. Jumlah penduduk usia 7-15 tahun yang masih sekolah	361 orang

3. Jumlah penduduk usia 7-15 tahun yang tidak sekolah	0 orang
<b>C. Rasio Guru dan Murid</b>	
1. Jumlah guru TK dan kelompok bermain anak	9 orang
2. Jumlah siswa TK dan kelompok bermain anak	42 orang
3. Jumlah guru SD dan sederajat	36 orang
4. Jumlah siswa SD dan sederajat	385 orang
5. Jumlah guru SLTP dan sederajat	0 orang
6. Jumlah siswa SLTP dan sederajat	0 orang
7. Jumlah guru SLTA/sederajat	38 orang
8. Jumlah siswa SLTA/sederajat	246 orang
9. Jumlah siswa SLB	0 orang
10. Jumlah guru SLB	0 orang
<b>D. Kelembagaan Pendidikan Masyarakat</b>	
Jumlah perpustakaan desa/kelurahan	1 unit
Jumlah taman bacaan desa/kelurahan	1 unit
Jumlah perpustakaan keliling	0 unit
Jumlah sanggar belajar	1 unit
Jumlah kegiatan lembaga pendidikan luar sekolah	0 kegiatan
Jumlah kelompok belajar Paket A	0 kelompok
Jumlah peserta ujian Paket A	0 orang
Jumlah kelompok belajar Paket B	0 kelompok
Jumlah Peserta ujian Paket B	0 orang
Jumlah kelompok belajar Paket C	0 kelompok

Jumlah peserta ujian Paket C	0 orang
Jumlah lembaga kursus keterampilan	1 unit
Jumlah peserta kursus keterampilan	21 orang

## IX. KESEHATAN MASYARAKAT

<b>A. Kualitas Ibu Hamil</b>	
Jumlah ibu hamil	13 orang
Jumlah ibu hamil periksa di Posyandu	13 orang
Jumlah ibu hamil periksa di Puskesmas	9 orang
Jumlah ibu hamil periksa di Rumah Sakit	0 orang
Jumlah ibu hamil periksa di Dokter Praktek	2 orang
Jumlah ibu hamil periksa di Bidan Praktek	3 orang
Jumlah ibu hamil periksa di Dukun Terlatih	0 orang
Jumlah kematian ibu hamil	0 orang
Jumlah ibu hamil melahirkan	0 orang
Jumlah ibu nifas	0 orang
Jumlah kematian ibu nifas	0 orang
Jumlah ibu nifas hidup	0 orang
<b>B. Kualitas Bayi</b>	
Jumlah keguguran kandungan	0 orang
Jumlah bayi lahir	23 orang
Jumlah bayi lahir mati	0 orang
Jumlah bayi lahir hidup	0 orang

Jumlah bayi mati usia 0 – 1 bulan	0 orang
Jumlah bayi mati usia 1 – 12 bulan	0 orang
Jumlah bayi lahir berat kurang dari 2,5 kg	5 orang
Jumlah bayi 0-5 tahun hidup yang menderita kelainan organ tubuh, fisik dan mental	0 orang
<b>C. Kualitas Persalinan</b>	
<b>Tempat Persalinan</b>	
Tempat persalinan Rumah Sakit Umum	5 unit
Tempat persalinan Rumah Bersalin	1 unit
Tempat persalinan Puskesmas	0 unit
Tempat persalinan Polindes	0 unit
Tempat persalinan Balai Kesehatan Ibu Anak	0 unit
Tempat persalinan rumah praktek bidan	2 unit
Tempat praktek dokter	0 unit
Rumah dukun	0 unit
Rumah sendiri	0 unit
<b>Pertolongan Persalinan</b>	
Jumlah Persalinan ditolong Dokter	2 tindakan
Jumlah persalinan ditolong bidan	6 tindakan
Jumlah persalinan ditolong perawat	0 tindakan
Jumlah persalinan ditolong dukun bersalin	0 tindakan
Jumlah persalinan ditolong keluarga	0 tindakan
<b>D. Cakupan Imunisasi</b>	

Jumlah Bayi usia 2 bulan	4 orang
Jumlah bayi 2 bulan Imunisasi DPT-1, BCG dan Polio -1	1 orang
Jumlah bayi usia 3 bulan	2 orang
Jumlah bayi 3 bulan yang imunisasi DPT-2 dan Polio-2	7 orang
Jumlah bayi usia 4 bulan	8 orang
Jumlah bayi 4 bulan yang imunisasi DPT-3 dan Polio-3	21 orang
Jumlah bayi 9 bulan	11 orang
Jumlah bayi 9 bulan yang imunisasi campak	11 orang
Jumlah bayi yang sudah imunisasi cacar	12 orang
<b>E. Perkembangan Pasangan Usia Subur dan KB</b>	
Pasangan Usia Subur	
Jumlah remaja putri usia 12 – 17 tahun	0 orang
Jumlah perempuan usia subur 15 – 49 tahun	921 orang
Jumlah wanita kawin muda usia kurang dari 16 tahun	0 orang
Jumlah pasangan usia subur	623 pasangan
<b>Keluarga Berencana</b>	
Jumlah akseptor KB	0 orang
Jumlah pengguna alat kontrasepsi suntik	201 orang
Jumlah pengguna metode kontrasepsi spiral	71 orang
Jumlah pengguna alat kontrasepsi kondom	33 orang
Jumlah pengguna metode kontrasepsi pil	29 orang
Jumlah pengguna metode vasektomi	2 orang
Jumlah pengguna metode kontrasepsi tubektomi	83 orang

Jumlah pengguna metode KB Kelender/KB Alamiah	0 orang
Jumlah pengguna metode KB obat tradisional	0 orang
Jumlah pengguna alat kontrasepsi metode xxx	39 orang
Jumlah PUS yang tidak menggunakan metode KB	204 orang
<b>F. Wabah Penyakit</b>	
<b>Muntaber</b>	
Jumlah kejadian dalam 1 tahun ini	17 kejadian
Jumlah yang meninggal	0 kejadian
<b>G. Angka Harapan Hidup</b>	
Angka harapan hidup penduduk Desa/Kelurahan	5.535,00 Tahun
Angka harapan hidup penduduk Kabupaten/Kota	5.535,00 Tahun
Angka Harapan Hidup Provinsi	0,00 Tahun
Angka harapan Hidup Nasional	0,00 Tahun
<b>H. Cakupan pemenuhan kebutuhan air bersih</b>	
1. Jumlah keluarga menggunakan sumur gali	0 Keluarga
2. Jumlah keluarga pelanggan PAM	1.597 Keluarga
3. Jumlah keluarga menggunakan Penampung Air Hujan	0 Keluarga
4. Jumlah keluarga menggunakan sumur pompa	5 Keluarga
5. Jumlah keluarga menggunakan perpipaan air kran	0 Keluarga
6. Jumlah keluarga menggunakan hidran umum	0 Keluarga
7. Jumlah keluarga menggunakan air sungai	0 Keluarga

8. Jumlah keluarga menggunakan embung	0 Keluarga
9. Jumlah keluarga yang menggunakan mata air	0 Keluarga
10. Jumlah keluarga yang tidak mendapatkan akses air minum dari air laut	0 Keluarga
11. Jumlah keluarga yang tidak mendapatkan akses air minum dari sumber di atas	0 Keluarga
Total jumlah keluarga	0 Keluarga
<b>I. Perilaku hidup bersih dan sehat</b>	
Kebiasaan buang air besar	
Jumlah keluarga memiliki WC yang sehat	57 Keluarga
Jumlah keluarga memiliki WC yang kurang memenuhi standar kesehatan	42 Keluarga
Jumlah keluarga biasa buang air besar di sungai/parit/kebun/hutan	0 Keluarga
Jumlah keluarga yang menggunakan fasilitas MCK umum	5 Keluarga
<b>Pola makan</b>	
Kebiasaan penduduk makan dlm sehari 1 kali	Ada
Kebiasaan penduduk makan sehari 2 kali	Ada
Kebiasaan penduduk makan sehari 3 kali	Ada
Kebiasaan penduduk makan sehari lebih dari 3 kali	Ada
Penduduk yang belum tentu sehari makan 1 kali	Tidak
<b>Kebiasaan berobat bila sakit</b>	
Dukun Terlatih	Tidak ada
Dokter/puskesmas/mantri kesehatan/perawat/bidan/posyandu	Sedikit
Obat tradisional dari dukun pengobatan alternatif	Tidak ada

Paranormal	Tidak ada
Obat tradisional dari keluarga sendiri	Tidak ada
Tidak diobati	Tidak ada
<b>J. Status Gizi Balita</b>	
Jumlah Balita	83 orang
Jumlah Balita bergizi buruk	0 orang
Jumlah Balita bergizi baik	83 orang
Jumlah Balita bergizi kurang	0 orang
Jumlah Balita bergizi lebih	33 orang

<b>K. Jumlah Penderita Sakit tahun ini</b>		
<b>Jenis penyakit</b>	<b>Jumlah penderita</b>	<b>Di rawat di</b>
Asma	1 orang	Rumah sakit

<b>L. Perkembangan Sarana dan Prasarana Kesehatan Masyarakat</b>	
Jumlah MCK Umum	57 unit
Jumlah Posyandu	5 unit
Jumlah kader Posyandu aktif	5 orang
Jumlah pembina Posyandu	10 orang
Jumlah Dasawisma	13 Dasawisma
Jumlah pengurus Dasa Wisma aktif	15 orang
Jumlah kader bina keluarga balita aktif	15 orang
Jumlah petugas lapangan keluarga berencana aktif	2 orang
Buku rencana kegiatan Posyandu	3 buku



Buku data pengunjung Posyandu	1 buku
Buku kegiatan pelayanan Posyandu	Diisi
Buku administrasi Posyandu lainnya	15 jenis
Jumlah kegiatan Posyandu	5 jenis
Jumlah kader kesehatan lainnya	10 orang
Jumlah kegiatan pengobatan gratis	0 jenis
Jumlah kegiatan pemberantasan sarang nyamuk/PSN	2 jenis
Jumlah kegiatan pembersihan lingkungan	1 jenis
Lainnya	1 jenis

## X. KEAMANAN DAN KETERTIBAN

<b>A. Konflik SARA</b>	
Kasus konflik pada tahun ini	0 kasus
Kasus konflik SARA pada tahun ini	0 kasus
Jumlah kasus pertengkaran dan atau perkelahian antar tetangga	0 kasus
Jumlah kasus pertengkaran dan atau perkelahian antar RT/RW	0 kasus
Jumlah konflik antar masyarakat pendatang dengan penduduk asli	0 kasus
Jumlah kasus antar kelompok masyarakat dalam desa/kelurahan dengan kelompok masyarakat dari desa/kelurahan lain	0 kasus
Jumlah konflik antara masyarakat dengan pemerintah	0 kasus
Jumlah kerugian material akibat konflik antara masyarakat dan pemerintah	Rp 0,00
Jumlah korban jiwa akibat konflik antara masyarakat dengan pemerintah	0 orang
Jumlah konflik antara masyarakat dengan perusahaan	0 orang
Jumlah korban jiwa akibat konflik antara masyarakat dengan perusahaan	0 orang

Jumlah kerugian material akibat konflik antara masyarakat dan pemerintah	0 orang
Jumlah konflik politik antara masyarakat dengan lembaga politik	0 kasus
Jumlah korban jiwa akibat konflik politik antara masyarakat dengan lembaga politik	0 orang
Jumlah kerugian material akibat konflik politik antara masyarakat dengan lembaga politik	Rp 0,00
Jumlah prasarana dan sarana yang rusak/terbakar akibat konflik Sara	0 buah
Jumlah rumah penduduk yang rusak/terbakar akibat konflik Sara	0 rumah
Jumlah korban luka akibat konflik Sara	0 orang
Jumlah korban meninggal akibat konflik Sara	0 orang
Jumlah janda akibat konflik Sara	0 orang
Jumlah anak yatim akibat konflik Sara	0 orang
Jumlah pelaku konflik yang diadili atau diproses secara hukum	0 orang
<b>B. Perkelahian</b>	
Kasus perkelahian yang terjadi pada tahun ini	0 kasus
Kasus perkelahian yang menimbulkan korban jiwa	0 kasus
Kasus perkelahian yang menimbulkan luka parah	0 kasus
Kasus perkelahian yang menimbulkan kerugian material	0 kasus
Jumlah pelaku konflik yang diadili atau diproses secara hukum	0 orang
<b>C. Pencurian</b>	
Kasus pencurian dan perampokan yang terjadi tahun ini	1 kasus
Kasus pencurian/perampokan yang korbannya penduduk Desa/Kelurahan setempat	0 kasus
Kasus pencurian/perampokan yang pelakunya penduduk Desa/Kelurahan setempat	0 kasus
Jumlah pencurian dengan kekerasan senjata api	0 kasus
Jumlah pelaku yang diadili atau diproses secara hukum	0 orang

<b>D. Penjarahan dan Penyerobotan Tanah</b>	
Jumlah kasus penjarahan dan penyerobotan tanah yang korban dan pelakunya penduduk setempat	0 kasus
Jumlah kasus penjarahan dan penyerobotan tanah yang korban penduduk setempat tetapi pelakunya bukan penduduk setempat	0 kasus
Jumlah kasus penjarahan dan penyerobotan tanah yang korban bukan penduduk setempat tetapi pelakunya penduduk setempat	0 kasus
Jumlah pelaku yang diadili atau diproses secara hukum	0 orang
<b>E. Perjudian, Penipuan dan Penggelapan</b>	
Jumlah penduduk yang memiliki kebiasaan berjudi	0 orang
Jenis perjudian yang ada di Desa/Kelurahan ini	0 orang
Jumlah kasus penipuan dan atau penggelapan	0 orang
Jumlah kasus sengketa warisan, jual beli dan utang piutang	0 orang
<b>F. Pemakaian Miras dan Narkoba</b>	
Jumlah warung/toko yang menyediakan Miras	0 buah
Jumlah penduduk yang mengkonsumsi Miras	0 orang
Jumlah kasus mabuk akibat Miras	0 kasus
Jumlah pengedar Narkoba	1 orang
Jumlah penduduk yang mengkonsumsi Narkoba	1 orang
Jumlah kasus mabuk/teler akibat Narkoba	0 kasus
Jumlah kasus kematian akibat Narkoba	0 kasus
Jumlah pelaku Miras yang diadili atau diproses secara hukum	0 orang
Jumlah pelaku Narkoba yang diadili atau diproses secara hukum	1 orang

<b>G. Prostitusi</b>	
Jumlah penduduk pekerja pramu nikmat	0 orang
Lokalisasi prostitusi	Tidak Ada
Jumlah tempat yang menyediakan wanita pramunikmat secara terselubung (warung remang-remang, panti pijat, hotel, dll)	0 buah
Jumlah kasus/konflik akibat maraknya praktek prostitusi	0 kasus
Jumlah pembinaan pelaku prostitusi	0 kali
Jumlah penertiban penyediaan tempat prostitusi	0 kali
<b>H. Pembunuhan</b>	
Jumlah kasus pembunuhan pada tahun ini	0 orang
Jumlah kasus pembunuhan dengan korban penduduk Desa/Kelurahan setempat	0 kasus
Jumlah kasus pembunuhan dengan pelaku penduduk setempat	0 kasus
Jumlah kasus bunuh diri	0 kasus
Jumlah Kasus Yang Diproses secara hukum	0 kasus
<b>I. Penculikan</b>	
Jumlah kasus penculikan	0 kasus
Jumlah kasus penculikan dengan korban penduduk Desa/Kelurahan setempat	0 kasus
Jumlah kasus penculikan dengan pelaku penduduk setempat	0 kasus
Jumlah kasus penculikan yang diselesaikan secara hukum	0 kasus
<b>J. Kejahatan seksual</b>	
Jumlah kasus perkosaan pada tahun ini	0 kasus
Jumlah kasus perkosaan anak pada tahun ini	0 kasus
Jumlah kasus kehamilan di luar nikah menurut hukum negara	0 kasus

Jumlah kasus kehamilan di luar nikah menurut hukum adat	0 kasus
Jumlah tempat penampungan/persewaan kamar bagi pekerja seks	0 unit
<b>K. Masalah Kesejahteraan Sosial</b>	
Jumlah gelandangan	0 orang
Jumlah pengemis jalanan	0 orang
Jumlah anak jalanan dan terlantar	0 orang
Jumlah manusia lanjut usia terlantar	0 orang
Jumlah orang gila/stress/cacat mental	0 orang
Jumlah orang cacat fisik	1 orang
Jumlah orang kelainan kulit	0 orang
Jumlah orang yang tidur di kolong jembatan/emperan	0 orang
Jumlah rumah dan kawasan kumuh	0 unit
Jumlah panti jompo	0 unit
Jumlah panti asuhan anak	2 unit
Jumlah rumah singgah anak jalanan	0 unit
Jumlah penghuni jalur hijau dan taman kota	0 orang
Jumlah penghuni bantaran sungai	0 orang
Jumlah penghuni pinggiran rel kereta api	0 orang
Jumlah penghuni liar di lahan dan fasilitas umum lainnya	0 orang
Jumlah anggota kelompok masyarakat/suku/keluarga terasing, terisolir, terlantar dan primitif	0 orang
Jumlah anak yatim usia 0–18 tahun	25 orang
Jumlah anak piatu 0 - 18 tahun	35 orang
Jumlah anak yatim piatu 0–18 tahun	55 orang
Jumlah janda	45 orang

Jumlah duda	20 orang
Jumlah anak, remaja, preman dan pengangguran	10 orang
Jumlah anak usia 7-12 tahun yang tidak sekolah di SD/ sederajat	0 orang
Jumlah anak usia 13-15 tahun yang tidak sekolah di SLTP/ sederajat	0 orang
Jumlah anak usia 15-18 tahun yang tidak sekolah di SLTA/ sederajat	0 orang
Jumlah anak yang bekerja membantu keluarga menghasilkan uang	0 orang
Jumlah perempuan yang menjadi kepala keluarga	0 orang
Jumlah penduduk eks NAPI	0 orang
Jumlah penduduk tinggal di daerah rawan bencana banjir	0 orang
Jumlah penduduk tinggal di daerah rawan bencana gunung berapi	0 orang
Jumlah penduduk tinggal di daerah rawan bencana tsunami	0 orang
Jumlah penduduk tinggal di daerah rawan bencana gempa bumi	0 orang
Jumlah penduduk tinggal di daerah rawan bencana kebakaran rumah	0 orang
Jumlah penduduk tinggal di daerah rawan bencana kekekeringan	0 orang
Jumlah penduduk tinggal di daerah rawan bencana tanah longsor	0 orang
Jumlah penduduk tinggal di daerah rawan bencana kebakaran hutan	0 orang
Jumlah penduduk rawan bencana kelaparan	0 orang
Jumlah penduduk tinggal di daerah rawan air bersih	0 orang
Jumlah penduduk tinggal di daerah lahan kritis dan tandus	0 orang
Jumlah penduduk tinggal di kawasan padat penduduk dan kumuh	0 orang
Jumlah warga pendatang yang tidak memiliki keterangan penduduk	0 orang
Jumlah warga pendatang dan atau pekerja musiman	0 orang
<b>L. Kekerasan Dalam Rumah Tangga</b>	
Jumlah kasus kekerasan suami terhadap istri	0 kasus

Jumlah kasus kekerasan istri terhadap suami	0 kasus
Jumlah kasus kekerasan orang tua terhadap anak	0 kasus
Jumlah kasus kekerasan anak terhadap orang tua	0 kasus
Jumlah kasus kekerasan kepala keluarga terhadap anggota keluarga lainnya	0 kasus
<b>M. Teror dan Intimidasi</b>	
Jumlah kasus intimidasi dan atau teror anggota masyarakat dari pihak dalam desa dan kelurahan	0 kasus
Jumlah kasus intimidasi dan atau teror anggota masyarakat dari pihak luar desa atau kelurahan	0 kasus
Jumlah kasus selebaran gelap dan atau isu yang bersifat teror dan ancaman untuk menimbulkan ketakutan penduduk	0 kasus
Jumlah kasus terorisme yang terjadi di desa dan kelurahan tahun ini	0 kasus
Jumlah kasus hasutan dan pemaksaan kehendak kelompok tertentu kepada masyarakat	0 kasus
Jumlah penyelesaian kasus teror dan intimidasi serta hasutan di masyarakat baik secara adat maupun hukum formal	0 kasus
<b>N. Pelembagaan Sistem Keamanan Lingkungan Semesta</b>	
Organisasi Siskamling	Ada
Organisasi Pertahanan Sipil dan Perlindungan Masyarakat	Ada
Jumlah RT atau sebutan lainnya yang ada Siskamling/Pos Ronda	22 RT
Jumlah anggota Hansip dan Linmas	15 orang
Jadwal kegiatan Siskamling dan Pos Ronda	Ada
Buku anggota Hansip dan Linmas	1 jenis
Jumlah kelompok Satuan Pengamanan (SATPAM) swasta	0 unit
Jumlah pembinaan Siskamling oleh Pengurus dan Kades/Lurah	1 kegiatan
Jumlah Pos Jaga Induk Desa/Kelurahan	22 Pos

## XI. KEDAULATAN POLITIK MASYARAKAT

<b>A. Kesadaran berpemerintahan, berbangsa dan bernegara</b>	
Jenis kegiatan pemantapan nilai Ideologi Pancasila sebagai Dasar Negara	0 jenis
Jumlah kegiatan pemantapan nilai Ideologi Pancasila sebagai Dasar Negara	0 kegiatan
Jenis-jenis kegiatan pemantapan nilai Bhinneka Tunggal Ika	1 jenis
Jumlah kegiatan pemantapan nilai Bhinneka Tunggal Ika	5 kegiatan
Jenis kegiatan pemantapan kesatuan bangsa lainnya	0 jenis
Jumlah kegiatan pemantapan kesatuan bangsa lainnya	0 kegiatan
Jumlah kasus warga desa/kelurahan yang minta suaka/lari ke luar negeri	0 kasus
Jumlah warga yang melintasi perbatasan ke negara tetangga secara resmi	0 orang
Jumlah warga yang melintasi perbatasan negara tetangga secara tidak resmi	0 orang
Jumlah kasus pertempuran atau perlawanan antar kelompok pengacau keamanan di perbatasan negara dengan warga/aparat dari desa/kelurahan	0 kasus
Jumlah serangan terhadap fasilitas umum dan milik masyarakat oleh kelompok pengacau di desa/kelurahan perbatasan negara tetangga	0 kasus
Jumlah kasus yang diklasifikasikan merongrong keutuhan NKRI dan Kesatuan Bangsa Indonesia di desa/kelurahan tahun ini	0 kasus
Jumlah korban manusia baik luka maupun tewas serta korban materi lainnya akibat serangan kelompok pengacau keamanan	0 kasus
Jumlah masalah ketenagakerjaan di perbatasan antar negara yang terjadi tahun ini	0 kasus
Jumlah kasus kejahatan pencurian, penjarahan, perampokan dan intimidasi serta teror yang terjadi di desa/kelurahan perbatasan antar negara	0 kasus
Jumlah sengketa perbatasan antar negara yang terjadi desa/kelurahan ini	0 kasus
Jumlah kasus sengketa perbatasan yang terjadi baik antar desa/kelurahan dalam kecamatan maupun antar kecamatan, antar kabupaten/kota dan desa/kelurahan antar provinsi.	0 kasus



Jumlah kasus yang terkait dengan perbatasan antar negara yang dilaporkan Kepala Desa/Lurah ke pemerintah tingkat atasnya	0 kasus
Jumlah kasus yang mengarah kepada tindakan disintegrasi bangsa dan pengingkaran NKRI, Pancasila, UUD 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika yang difasilitasi penyelesaiannya oleh Kepala Desa/Lurah	0 kasus
Jumlah kasus penangkapan nelayan asing di wilayah perairan desa/kelurahan	0 kasus
Jumlah kasus penangkapan nelayan/petani/peternak/ pekebun/perambah hutan asal desa/kelurahan di perairan dan daratan wilayah negara lain	0 kasus
<b>B. Kesadaran membayar Pajak dan Retribusi</b>	
Jenis pajak yang dipungut sebagai kewenangan dan atau tugas desa/kelurahan	1 jenis
Jumlah Wajib Pajak	1000 orang
Target PBB	Rp 138.316.097,00
Realisasi PBB	75,00 %
Jumlah Tindakan terhadap penunggak PBB	2 tindakan
Jenis Retribusi yang dipungut sebagai tugas dan kewenangan desa/kelurahan	0 jenis
Jumlah wajib retribusi yang menjadi tugas/kewenangan desa/kelurahan	0 orang
Target retribusi yang menjadi tugas/kewenangan desa/kelurahan	Rp 0,00
Realisasi retribusi yang menjadi tugas/kewenangan desa/kelurahan	0,00 %
Jenis pungutan resmi lainnya di Desa/Kelurahan	0 jenis
Target pungutan resmi tingkat desa/kelurahan	Rp 0,00
Realisasi pungutan resmi di desa/kelurahan	0,00 %
Jumlah kasus pungutan liar	0 kasus
Jumlah penyelesaian kasus pungutan liar	0 kasus
<b>C. Partisipasi Politik</b>	

<b>1. Jumlah Partai Politik dan Pemilihan Umum</b>	
Jumlah penduduk yang memiliki hak pilih	3929 orang
Jumlah penduduk yang menggunakan hak pilih pada pemilu legislatif yang lalu	3929 orang
Jumlah perempuan dari penduduk desa/kelurahan ini yang aktif di partai politik	1 orang
Jumlah partai politik yang memiliki pengurus sampai di Desa/Kelurahan ini	3 partai
Jumlah partai politik yang mempunyai kantor di wilayah desa/kelurahan ini	1 partai
Jumlah penduduk yang menjadi pengurus partai politik dari desa/kelurahan	0 orang
Jumlah penduduk yang dipilih dalam Pemilu Legislatif yang lalu	1 orang
Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih dalam pemilihan presiden/wakil	3929 pemilih
<b>2. Pemilihan Kepala Daerah</b>	
Jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih	4266 orang
Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih dalam pemilu Bupati/Walikota lalu	4256 pemilih
Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih dalam pemilu Gubernur yang lalu	4256 pemilih
<b>3. Penentuan Kepala Desa/Lurah dan Perangkat Desa/Kelurahan</b>	
Penentuan Jabatan Kepala Desa	
Penentuan Sekretaris Desa	
Penentuan Perangkat Desa termasuk Kepala Dusun	
Masa jabatan Kepala Desa	0 tahun
Penentuan Jabatan Lurah dan Perangkat Kelurahan termasuk Kepala Lingkungan	

<b>4. Pemilihan BPD</b>	
Jumlah anggota BPD	0 orang
Penentuan anggota BPD	
Pimpinan BPD	
Pemilikan kantor/ruang kerja BPD	
Anggaran untuk BPD	
Produk keputusan BPD tahun ini	1. Peraturan Desa 0 buah
	2. Permintaan keterangan dari Kepala Desa 0 kali
	3. Rancangan Peraturan Desa. 0 buah
	4. Menyalurkan aspirasi masyarakat 0 kali
	5. Menyatakan pendapat kepada Kepala Desa 0 kali
	6. Menyampaikan usul dan pendapat kepada Kepala Desa 0 kali
	7. Mengevaluasi efektivitas pelaksanaan APB Desa 0 kali
<b>5. Pemilihan dan Fungsi Lembaga Kemasyarakatan</b>	
Keberadaan organisasi lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan	
Dasar hukum keberadaan Lembaga	

Kemasyarakatan Desa/LKD	
Jumlah organisasi anggota lembaga kemasyarakatan desa termasuk RT, RW, PKK, LKMD/K, LPM, Karang Taruna, Bumdes, Lembaga Adat, Kelompok Tani dan lembaga lainnya sesuai ketentuan	30 unit organisasi
Dasar hukum pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan/LKK	Perwal
Jumlah organisasi anggota lembaga kemasyarakatan kelurahan	1 unit organisasi
Pemilihan pengurus LKD/LKK	4 org
Pemilihan pengurus organisasi anggota LKD/LKK termasuk PKK, LPM/LKMD/K, Karang Taruna, RT, RW, Bumdes, lembaga adat, kelompok tani dan organisasi anggota LKD/LKK lainnya	
Implementasi tugas, fungsi dan kewajiban LKD/LKK	Meningkatkan taraf hidup massa
Jumlah kegiatan yang dilaksanakan LKD/LKK	5 kegiatan
Fungsi, tugas dan kewajiban lembaga kemasyarakatan yang dijalankan organisasi anggota LKD/LKK	
Jumlah kegiatan lembaga kemasyarakatan yang dijalankan organisasi anggota LKD/LKK	1 kegiatan
Alokasi anggaran untuk LKD/LKK	Rp. 35.000.000,-
Alokasi anggaran untuk organisasi anggota LKD/LKK termasuk PKK, PM/LKMD/K, Karang Taruna, RT, RW, kelompok tani dan organisasi lainnya	Rp. 35.000.000,-
Kantor dan ruangan kerja untuk LKD/LKK	Ada 1 unit
Dukungan pembiayaan, personil dan ATK untuk Sekretariat LKD/LKK dari APB-Desa dan Anggaran Kelurahan/APBD	Rencana Kerja
Realisasi program kerja organisasi anggota LKD/LKK	1 % per bulan
Keberadaan Alat kelengkapan organisasi anggota LKD/LKK termasuk Dasawisma dan Pokja, Bidang, Seksi, Urusan, dan terisi tidaknya struktur organisasi anggota LKD/LKK	1 unit komputer, 3 Fileng kabinet, 2 unit meja
Kegiatan administrasi dan Ketatausahaan LKD/LKK	

### C. PERANSERTA MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN

<b>1. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa/Kelurahan/ Musrenbangdes/ kelurahan</b>	
Jumlah musyawarah perencanaan pembangunan tingkat Desa/Kelurahan yang dilakukan pada tahun ini, termasuk di tingkat dusun dan lingkungan	2 kali
Jumlah kehadiran masyarakat dalam setiap kali musyawarah tingkat dusun/lingkungan dan desa/kelurahan	45,00 %
Jumlah peserta laki-laki dalam Musrenbang di desa/kelurahan	45,00 %
Jumlah peserta perempuan dalam Musrenbang di desa dan kelurahan	10,00 %
Jumlah Musyawarah Antar Desa dalam perencanaan pembangunan yang dikoordinasikan Kecamatan	100,00 %
Penggunaan Profil Desa/Kelurahan sebagai sumber data dasar yang digunakan dalam perencanaan pembangunan desa dan Forum Musrenbang Partisipatif	Ya
Penggunaan data BPS dan data sektoral dalam perencanaan pembangunan partisipatif dan Musrenbang di desa dan Kelurahan	Ya
Pelibatan masyarakat dalam pemutakhiran data profil desa dan kelurahan sebagai bahan dalam Musrenbang partisipatif	Ya
Usulan masyarakat yang disetujui menjadi Rencana Kerja Desa dan Kelurahan	100,00 %
Usulan Pemerintah Desa dan Kelurahan yang disetujui menjadi Rencana Kerja Desa/Kelurahan dan dimuat dalam RAPB-Desa	95,00 %
Usulan rencana kerja program dan kegiatan dari pemerintah kabupaten/kota/provinsi dan pusat yang dibahas saat Musrenbang dan disetujui untuk dilaksanakan di desa dan kelurahan oleh masyarakat dan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan	95,00 %
Usulan rencana kerja pemerintah tingkat atas yang ditolak dalam Musrenbangdes/kel	1 kegiatan
Pemilikan dokumen Rencana Kerja Pembangunan Desa/Kelurahan (RKPD/K)	Ada
Pemilikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa/Kelurahan (RPJMD/K)	Ada
Pemilikan dokumen hasil Musrenbang tingkat Desa dan Kelurahan yang diusulkan ke pemerintah tingkat atas untuk dibiayai dari APBD Kab/Kota, APBD Provinsi dan APBN maupun sumber biaya dari perusahaan swasta yang investasi di desa/kelurahan	Ada
Jumlah kegiatan yang diusulkan masyarakat melalui forum Musrenbangdes/kel yang tidak direalisasikan dalam	3 . kegiatan

APB-Desa, APB-Daerah Kabupaten/Kota dan Provinsi	
Jumlah kegiatan yang diusulkan masyarakat melalui forum Musrenbangdes/kel yang pelaksanaannya tidak sesuai dengan hasil Musrenbang	2 . kegiatan
<b>2. Peranserta masyarakat dalam Pelaksanaan dan Pelestarian Hasil Pembangunan</b>	
Jumlah masyarakat yang terlibat dalam pelaksanaan pembangunan fisik di desa dan kelurahan sesuai hasil Musrenbang	50,00 %
Jumlah penduduk yang dilibatkan dalam pelaksanaan proyek padat karya oleh pengelola proyek yang ditunjuk pemerintah desa/kelurahan atau kabupaten/kota	50,00 %
Jumlah kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat dan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan yang sudah ada sesuai ketentuan dalam APB-Desa	4 kegiatan
Jumlah kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak ketiga tanpa melibatkan masyarakat sesuai ketentuan dalam APB-Daerah	4 kegiatan
Jumlah kegiatan yang masuk desa/kelurahan di luar yang telah direncanakan dan disepakati masyarakat saat Musrenbang	0,00 %
Usulan masyarakat yang disetujui menjadi Rencana Kerja Desa dan Kelurahan	4,00 %
Usulan Pemerintah Desa dan Kelurahan yang disetujui menjadi Rencana Kerja Desa/Kelurahan	55,00 %
Usulan rencana kerja program dan kegiatan dari pemerintah kabupaten/kota/provinsi dan pusat yang dibahas saat Musrenbang dan disetujui untuk dilaksanakan di desa dan kelurahan oleh masyarakat	4,00 %
Penyelenggaraan musyawarah desa/kelurahan untuk menerima, memelihara dan melestarikan hasil pembangunan yang sudah ada	Ada
Pelaksanaan kegiatan dari masyarakat untuk menyelesaikan atau menindaklanjuti kegiatan yang belum diselesaikan oleh pelaksana sebelumnya.	Ada
Jumlah kasus penyimpangan pelaksanaan kegiatan pembangunan yang dilaporkan masyarakat atau lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan kepada Kepala Desa/Lurah	0 kasus
Jumlah kasus penyimpangan pelaksanaan pembangunan yang diselesaikan di tingkat desa/kelurahan	0 kasus
Jumlah kasus penyimpangan pelaksanaan kegiatan pembangunan desa/kelurahan yang diselesaikan secara hukum	0 kasus

Jenis kegiatan masyarakat untuk melestarikan hasil pembangunan yang dikoordinasikan pemerintah desa/kelurahan	1 Jenis
Jumlah kegiatan yang didanai dari APB-Desa dan swadaya masyarakat di kelurahan	0 kegiatan
Jumlah kegiatan di desa dan kelurahan yang didanai dari APB Daerah Kabupaten/Kota	4 kegiatan
Jumlah kegiatan di desa dan kelurahan yang didanai dari APBD Provinsi	0 kegiatan
Jumlah kegiatan di desa dan kelurahan yang didanai APBN	0 kegiatan
<b>3. Semangat Kegotongroyongan Penduduk</b>	
Jumlah kelompok arisan	2 buah
Jumlah penduduk menjadi orang tua asuh	7 orang
Ada tidaknya dana sehat	Ada
Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pembangunan rumah	ada
Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pengolahan tanah	Tidak
Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pembiayaan pendidikan anak sekolah/kuliah/kursus	Tidak
Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pemeliharaan fasilitas umum dan fasilitas sosial/prasarana dan sarana	Ada
Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pemberian modal usaha	Tidak
Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pengerjaan sawah dan kebun	Tidak
Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam penangkapan ikan dan usaha peternakan lainnya	Tidak
Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam menjaga ketertiban, ketentraman dan keamanan	Ada
Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam peristiwa kematian	Ada
Ada tidaknya kegiatan gotong royong menjaga kebersihan Desa/Kelurahan	Ada
Ada tidaknya kegiatan gotong royong membangun jalan/jembatan/saluran air/irigasi	Ada
Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pemberantasan sarang nyamuk dan	Ada

kesehatan lingkungan lainnya	
<b>4. Adat Istiadat</b>	
Adat istiadat dalam perkawinan	Aktif
Adat istiadat dalam kelahiran anak	Aktif
Adat istiadat dalam upacara kematian	Aktif
Adat istiadat dalam pengelolaan hutan	Tidak
Adat istiadat dalam tanah pertanian	Pernah Ada
Adat istiadat dalam pengelolaan laut/pantai	Tidak
Adat istiadat dalam memecahkan konflik warga	Pernah Ada
Adat istiadat dalam menjauhkan bala penyakit dan bencana alam	Pernah Ada
Adat istiadat dalam memulihkan hubungan antara alam semesta dengan manusia dan lingkungannya	Aktif
Adat istiadat dalam penanggulangan kemiskinan bagi keluarga tidak mampu/fakir miskin/terlantar	Pernah Ada
<b>5. Sikap Dan Mental Masyarakat</b>	
Jumlah jenis pungutan liar dari anak gelandangan di sudut jalanan	0 jenis
Jumlah jenis pungutan liar di terminal, pelabuhan dan pasar	0 jenis
Peminta-minta sumbangan perorangan dari rumah ke rumah	0
Peminta-minta sumbangan terorganisasi dari rumah ke rumah	0
Semakin berkembang praktek jalan pintas dalam mencari uang secara gampang walau tidak halal	0
Jenis pungutan dari RT atau sebutan lain kepada warga	2 jenis
Jenis pungutan dari RW atau sebutan lain kepada warga	0 jenis
Jenis pungutan dari desa/kelurahan kepada warga	0 jenis
Kasus aparat RT/RW atau sebutan lainnya di desa dan kelurahan yang dipecat kena kasus pungutan liar, pemerasan dan sejenisnya.	0 kasus
Dipindah karena kena kasus pungutan liar, pemerasan dan sejenisnya	0 kasus



Diberhentikan dengan hormat karena kena kasus pungutan liar, pemerasan dan sejenisnya	0 kasus
Dimutasi karena kasus pungutan liar, pemerasan dan sejenisnya	0 kasus
Banyak masyarakat yang memberikan biaya lebih dari yang ditentukan sebagai uang rokok atau ucapan terima kasih dalam proses pelayanan administrasi di kantor desa/kelurahan	0
Banyak warga yang ingin mendapatkan pelayanan gratis dari aparat desa/kelurahan	1
Banyak penduduk yang mengeluhkan memburuknya kualitas pelayanan kepada masyarakat	0
Banyak kegiatan yang bersifat hiburan dan rekreasi yang diinisiatifi masyarakat sendiri	1
Masyarakat agak kurang toleran dengan keberadaan kelompok masyarakat dari unsur etnis, agama dan kelompok kepentingan lain	0
<b>Etos Kerja Penduduk</b>	
Luas Wilayah Desa/Kelurahan sangat luas	84, 30 Ha
Banyak lahan terlantar yang tidak dikelola pemiliknya/petani berdasi	2 Ha
Banyak lahan pekarangan di sekitar perumahan yang tidak dimanfaatkan	1 Ha
Banyak lahan tidur milik masyarakat yang tidak dimanfaatkan	0
Jumlah petani pada musim gagal tanam/panen yang pasrah dan tidak mencari pekerjaan lain	1
Jumlah nelayan pada musim tidak melaut yang memanfaatkan keterampilan/keahlian lainnya untuk mencari pekerjaan lain	0
Banyak penduduk yang mencari pekerjaan di luar desa/kelurahan tetapi masih dalam wilayah kabupaten/kota	1
Banyak penduduk yang mencari pekerjaan di kota besar lainnya	1
Kebiasaan masyarakat merayakan pesta dengan menghadirkan undangan yang banyak	1
Masyarakat sering mendatangi kantor desa dan lurah menuntut penyediaan kebutuhan dasar sembilan bahan pokok pada saat kelaparan dan kekeringan	0
Kebiasaan masyarakat untuk mencari/mengumpulkan bahan makanan pengganti beras/jagung pada saat rawan pangan/kelaparan/gagal panen	0
Kebiasaan pemotongan hewan dalam jumlah besar untuk pesta adat dan perayaan upacara tertentu	0
Kebiasaan masyarakat berdemonstrasi/protes terhadap kebijakan pemerintah	0

Kebiasaan masyarakat terprovokasi karena isu-isu yang menyesatkan	0
Kebiasaan masyarakat bermusyawarah untuk menyelesaikan berbagai persoalan sosial kemasyarakatan	2
Lebih banyak masyarakat yang diam/masabodoh/apatis ketika ada persoalan yang terjadi di lingkungan sekitarnya	0
Kebiasaan aparat pemerintah desa/kelurahan terlebih di tingkat RT, RW, Dusun dan Lingkungan yang kurang menanggapi kesulitan yang dihadapi masyarakat	0
<b>XII. LEMBAGA KEMASYARAKATAN</b>	
<b>A. LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA/KELURAHAN</b>	
Keberadaan organisasi Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan/LKD/LK	ada
Jumlah kegiatan	30 Jenis
<b>B. ORGANISASI ANGGOTA LEMBAGA KEMASYARAKATAN</b>	
<b>1. LKD/LKK</b>	<b>Ada</b>
Kepengurusan	Aktif
Buku Administrasi	4 Jenis
Jumlah kegiatan	1 Jenis
Dasar hukum pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa	
Dasar hukum pembentukan lembaga kemasyarakatan kelurahan	ada
Dasar hukum pembentukan organisasi anggota lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan	ada

### **XIII. PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN**

<b>A. APB-Desa dan Anggaran Kelurahan</b>	
Jumlah anggaran belanja dan penerimaan Desa/Kelurahan tahun ini	Rp 506.593.140,00
Sumber Anggaran	
APBD Kabupaten/Kota	Rp 506.593.140,00
Bantuan Pemerintah Kabupaten/Kota	Rp 0,00
Bantuan Pemerintah Provinsi	Rp 0,00
Bantuan Pemerintah Pusat	Rp 0,00
Pendapatan Asli Desa	Rp 0,00
Swadaya Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp 0,00
Alokasi Dana Desa	Rp 0,00
Sumber Pendapatan dari Perusahaan yang ada di desa/kelurahan	Rp 0,00
Sumber pendapatan lain yang sah dan tidakmengikat	Rp 0,00
Jumlah Belanja Publik/belanja pembangunan	Rp 192.385.000,00
Jumlah Belanja Aparatur/pegawai	Rp 227.303.135,00
<b>B. Pertanggungjawaban Kepala Desa/Lurah</b>	
Penyampaian laporan keterangan pertanggung jawaban Kepala Desa kepada BPD	0
Jumlah informasi yang disampaikan kepala desa dan lurah tentang laporan penyelenggaraan tugas, wewenang, hak dan kewajiban kepala desa dan lurah kepada masyarakat	4 jenis
Status laporan keterangan pertanggungjawaban kepala Desa	1
Laporan kinerja penyelenggaraan tugas, wewenang, kewajiban dan hak kepala desa dan lurah kepada Bupati/Walikota	1
Jumlah jenis media informasi kinerja kepala desa dan lurah kepada masyarakat	0 jenis

Jumlah kasus pengaduan masyarakat terhadap masalah pembangunan, pelayanan dan pembinaan kemasyarakatan yang disampaikan kepada kepala desa/lurah	0 kasus
Jumlah kasus pengaduan masyarakat terhadap masalah pembangunan, pelayanan dan pembinaan kemasyarakatan yang diselesaikan kepala desa/lurah	0 kasus
<b>C. Prasarana Dan Administrasi Pemerintahan Desa/Kelurahan</b>	
<b>1. PEMERINTAH DESA/KELURAHAN</b>	
Gedung Kantor	1 unit
Jumlah ruang kerja	4 Ruang
Balai Desa/Kelurahan/sejenisnya	1 unit
Listrik	Ada (10.000.000 VA
Air bersih	ada
Telepon	ada
<b>1.A. Inventaris dan Alat tulis kantor</b>	
Jumlah mesin tik	buah
Jumlah meja	15 buah
Jumlah kursi	150 buah
Jumlah almari arsip	5 buah
Komputer	7 unit
Mesin fax	unit
Kendaraan Dinas Lurah/Kepala Desa	5 unit
<b>1. B. Administrasi Pemerintahan Desa/Kelurahan</b>	
Buku Data Peraturan Desa	

Buku Keputusan Kepala Desa/Lurah	
Buku Administrasi Kependudukan	7 unit
Buku Data Inventaris	14 unit
Buku Data Aparat	
Buku Data Tanah Kas Desa	
Buku Administrasi Pajak dan Retribusi	
Buku Data Tanah	1 unit
Buku Laporan Pengaduan Masyarakat	1 unit
Buku Agenda Ekspedisi	1 unit
Buku Profil Desa dan Kelurahan	1 unit
Buku Data Induk Penduduk	7 unit
Buku Data Mutasi Penduduk	1 unit
Buku Rekapitulasi Penduduk Akhir Bulan	1 unit
Buku Registrasi Pelayanan Penduduk	7 unit
Buku Data Penduduk Sementara	
Buku Anggaran Penerimaan	
Buku Anggaran Pengeluaran Pegawai/Pembangunan	
Buku Kas Umum	
Buku Kas Pembantu Penerimaan	
Buku Kas Pembantu Pengeluaran Rutin/Pembangunan	
Buku Data Lembaga Kemasyarakatan	
<b>2. PRASARANA DAN SARANA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA/BPD</b>	
Gedung Kantor	
Jumlah ruang kerja	Ruang

Balai BPD	-
Listrik	
Air bersih	
Telepon	
<b>2.A. Inventaris dan Alat tulis kantor</b>	
Jumlah mesin tik	buah
Jumlah meja	buah
Jumlah kursi	buah
Jumlah almari arsip	buah
Komputer	unit
Mesin fax	unit
<b>2.B. Administrasi BPD</b>	
Buku-buku administrasi kegiatan BPD	
Buku Buku Administrasi Keanggotaan	
Buku kegiatan BPD	
Buku himpunan peraturan desa	
Buku Lainnya	
<b>3. PRASARANA DAN SARANA DUSUN/LINGKUNGAN/SEBUTAN LAIN</b>	
Gedung kantor atau Balai Pertemuan	
Alat tulis kantor	
Barang inventaris	Jenis
Buku administrasi	Jenis

Jenis kegiatan	Jenis
Jumlah pengurus	Orang
Jumlah ruang kerja	Ruang
<b>D. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN</b>	
<b>1. Jenis Pembinaan Pemerintah Pusat kepada Pemerintahan Desa dan Kelurahan</b>	
Pedoman dan standar pelaksanaan urusan pemerintahan desa, kelurahan, lembaga kemasyarakatan	Perwal
Pedoman dan standar bantuan pembiayaan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota kepada desa dan kelurahan	Perwal
Pedoman umum administrasi, tata naskah dan pelaporan bagi kepala desa dan lurah	Perwal
Pedoman dan standar tanda jabatan, pakaian dinas dan atribut bagi Kepala Desa, Lurah dan Perangkat Desa/Kelurahan serta BPD	Perwal
Pedoman pendidikan dan pelatihan bagi pemerintahan desa, kelurahan, lembaga kemasyarakatan dan perangkat masing-masing	Ada
Jumlah bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan pemerintahan desa dan kelurahan serta pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	1 kegiatan
Jumlah kegiatan pendidikan dan pelatihan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan	1 kegiatan
Penelitian dan pengkajian penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan	1 kegiatan
Jumlah kegiatan yang terkait dengan upaya percepatan atau akselerasi pembangunan desa dan kelurahan dalam bidang ekonomi keluarga, penanganan bencana, penanggulangan kemiskinan, percepatan keberdayaan masyarakat, peningkatan prasarana dan sarana pedesaan/kelurahan, pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pengembangan sosial budaya masyarakat di desa dan kelurahan yang dibiayai APBN	1 jenis
Pemberian penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan pemerintahan desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan	1 kali
Pemberian sanksi atas penyimpangan yang dilakukan kepala desa, lurah dan perangkat masing-masing	0 kali

<b>2. Pembinaan Pemerintah Provinsi kepada Pemerintahan Desa dan Kelurahan</b>	
Pedoman pelaksanaan tugas pembantuan dari provinsi ke desa/kelurahan	0
Pedoman bantuan keuangan dari provinsi	0
Kegiatan fasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat dan lembaga adat beserta hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan pemerintahan desa/kelurahan	0
Fasilitasi Pelaksanaan pedoman administrasi, tata naskah dan pelaporan bagi kepala desa dan lurah	0
Jumlah kegiatan pendidikan dan pelatihan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan berskala provinsi	0 kegiatan
Kegiatan penanggulangan kemiskinan yang dibiayai APBD Provinsi yang masuk desa dan kelurahan	0 jenis
Kegiatan penanganan bencana yang dibiayai APBD Provinsi untuk desa dan kelurahan	0 jenis
Kegiatan peningkatan pendapatan keluarga yang dibiayai APBD Provinsi di desa dan kelurahan	0 jenis
Kegiatan penyediaan sarana dan prasarana desa dan kelurahan yang dibiayai APBD Provinsi yang masuk desa dan kelurahan	0 jenis
Kegiatan pemanfaatan sumber daya alam dan pengembangan teknologi tepat guna yang dibiayai APBD Provinsi di desa dan kelurahan	0 jenis
Kegiatan pengembangan sosial budaya masyarakat Pedoman pendataan dan pendayagunaan data profil desa dan kelurahan	0 jenis
Pemberian sanksi atas penyimpangan yang dilakukan kepala desa, lurah dan perangkat masing-masing	0 jenis
Pemberian penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan pemerintahan desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan	0 jenis
<b>3. Pembinaan Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintahan Desa dan Kelurahan</b>	
Pelimpahan tugas Bupati/Walikota kepada Lurah dan Kepala Desa	0 jenis
Penetapan pengaturan kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa	0 jenis
Pedoman pelaksanaan tugas pembantuan dari kabupaten/kota kepada desa	0 jenis
Pedoman teknis penyusunan peraturan desa, peraturan kepala desa, keputusan Lurah dan peraturan daerah kepada kepala desa dan lurah.	0 jenis



Pedoman teknis penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif serta pengembangan lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan	3 jenis
Kegiatan fasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat dan lembaga adat beserta hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan pemerintahan desa/kelurahan	0 jenis
Penetapan pembiayaan alokasi dana perimbangan untuk desa	0 jenis
Fasilitasi Pelaksanaan pedoman administrasi, tata naskah dan pelaporan bagi kepala desa dan lurah	55 jenis
Jumlah kegiatan pendidikan dan pelatihan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan berskala kabupaten/kota	0 jenis
Kegiatan penanggulangan kemiskinan yang dibiayai APBD kabupaten/kota yang masuk desa dan kelurahan	1 jenis
Kegiatan penanganan bencana yang dibiayai APBD kabupaten/kota untuk desa dan kelurahan	0 jenis
Kegiatan peningkatan pendapatan keluarga yang dibiayai APBD kabupaten/kota di desa dan kelurahan	1 jenis
Fasilitasi penetapan pedoman dan standar tanda jabatan, pakaian dinas dan atribut bagi Kepala Desa, Lurah, Perangkat Desa/Kelurahan dan BPD	2 jenis
Kegiatan fasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat dan lembaga adat beserta hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan pemerintahan desa/kelurahan	0 jenis
Pedoman pendataan dan pendayagunaan profil desa dan kelurahan	2 jenis
Program dan kegiatan pemeliharaan motivasi desa/kelurahan berprestasi pascaperlombaan desa dan kelurahan	4 jenis
Pemberian penghargaan atas prestasi yang dicapai pemerintahan desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	4 jenis
Pemberian sanksi atas penyimpangan yang dilakukan kepala desa, lurah dan perangkat masing-masing	0 kasus
Mengawasi pengelolaan keuangan desa serta anggaran kelurahan dan pendayagunaan aset pemerintahan desa, badan usaha milik desa dan sumber pendapatan daerah yang dikelola lurah	1 kasus
<b>4. Pembinaan dan Pengawasan Camat kepada Desa/Kelurahan</b>	
Jumlah Kegiatan fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa	0 kali
Jumlah Kegiatan fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa dan kelurahan	8 kali

Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa serta anggaran kelurahan	3 kali
Jumlah kegiatan fasilitasi pelaksanaan urusan otonomi daerah kabupaten/kota yang diserahkan kepada desa	0 kali
Fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang- undangan	0 kali
Fasilitasi penyediaan data dan pendayagunaan data profil desa dan kelurahan	3 kali
Jumlah kegiatan fasilitasi pelaksanaan tugas, wewenang, fungsi, hak dan kewajiban kepala desa, BPD, Lurah dan lembaga kemasyarakatan	0 kali
Jumlah kegiatan fasilitasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	2 kali
Fasilitasi penataan, penguatan dan efektivitas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan	1 kali
Jumlah kegiatan fasilitasi partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan dan pemeliharaan serta pengembangan dan pelestarian hasil pembangunan.	2 kali
Fasilitasi kerjasama antar desa/kelurahan dan kerjasama desa/kelurahan dengan pihak ketiga	3 kali
Jumlah kegiatan fasilitasi pelaksanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat	2 kali
Jumlah kegiatan pemeliharaan motivasi bagi desa dan kelurahan juara perlombaan dan pasca perlombaan	3 kali
Jumlah kegiatan fasilitasi kerjasama antar lembaga kemasyarakatan dan lembaga kemasyarakatan dengan organisasi anggota lembaga kemasyarakatan serta dengan pihak ketiga sebagai mitra percepatan keberdayaan masyarakat	6 kali
Jumlah kegiatan fasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada lembaga kemasyarakatan dan organisasi anggotanya	31 kali
Jumlah kegiatan koordinasi unit kerja pemerintahan dalam pengembangan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan.	1 kali

KOTA MADIUN, 13 Desember 2018  
PATIHAN  
Kecamatan MANGUHARJO  
Kota KOTA MADIUN

DJOKO SLAMET HARDJANA, SH.  
Lurah

Tembusan :

1. Camat MANGUHARJO
2. Walikota KOTA MADIUN
3. Arsip